



## Penerapan BPOM Mobile Wujud Digitalisasi Layanan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Padang

### *The Implementation of BPOM Mobile as a Form of Digitalization of Drug and Food Regulatory Services in Padang City*

**Aprilya Gempani<sup>1\*</sup>, Fatimah Azzahra<sup>2</sup>, Giva Febria Esa Rahman<sup>3</sup>, Widya Ramadhani<sup>4</sup>  
Yulia Hanoselina<sup>5</sup>**

Universitas Negeri Padang

Email: [aprilyagempani09@gmail.com](mailto:aprilyagempani09@gmail.com)<sup>1</sup>, [fazzahrafat@gmail.com](mailto:fazzahrafat@gmail.com)<sup>2</sup>, [givafebriaesarahman@gmail.com](mailto:givafebriaesarahman@gmail.com)<sup>3</sup>  
[widyaramadhani88@gmail.com](mailto:widyaramadhani88@gmail.com)<sup>4</sup>, [yuliahanolselina@fis.unp.ac.id](mailto:yuliahanolselina@fis.unp.ac.id)<sup>5</sup>

---

#### Article Info

##### Article history :

Received : 08-12-2025

Revised : 09-12-2025

Accepted : 11-12-2025

Published : 13-12-2025

---

#### Abstract

*This study examines the urgency of digital technology adoption in government governance to improve transparency, accountability, and the effectiveness of drug and food supervision by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in Padang City. The research addresses the limited public understanding and utilization of the BPOM Mobile application, which is influenced by low digital literacy, insufficient socialization, and unequal access to technology. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving BPOM Padang officers and community users. The findings reveal that BPOM Mobile significantly enhances public access to real-time product verification, violation reporting, and food safety information. Despite several implementation challenges, the application proves to be an effective digital public service innovation that strengthens regulatory oversight, improves community literacy, and supports local economic empowerment.*

---

**Keywords :BPOM Mobile, Digitalization, Drug and Food Supervision**

---

#### Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada urgensi penerapan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan obat dan makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Padang. Permasalahan umum yang diidentifikasi adalah rendahnya tingkat pemahaman dan pemanfaatan aplikasi BPOM Mobile oleh masyarakat akibat keterbatasan literasi digital, minimnya sosialisasi, serta akses teknologi yang belum merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan, pemanfaatan, serta kontribusi BPOM Mobile dalam mendukung pengawasan obat dan makanan berbasis digital di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan informan yang terdiri dari pengelola BPOM Padang dan masyarakat pengguna aplikasi. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan BPOM Mobile mempermudah masyarakat dalam memverifikasi izin edar produk, melaporkan pelanggaran, serta mengakses informasi keamanan pangan secara *real time*. Walaupun dalam penerapannya masih terdapat beberapa hambatan, Namun keseluruhan, BPOM Mobile terbukti menjadi inovasi pelayanan publik berbasis digital yang mampu memperkuat pengawasan, meningkatkan literasi masyarakat, dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.

**Kata Kunci : BPOM Mobile, Digitalisasi, Pengawasan Obat dan Makanan**

#### PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi salah satu agenda strategis nasional yang bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi publik. Dalam konteks



pengawasan obat dan makanan, digitalisasi diwujudkan melalui pengembangan aplikasi BPOM *Mobile*, yang menjadi sarana informasi publik serta sistem pelaporan dan pemantauan keamanan produk secara *real-time*. Beberapa studi menegaskan bahwa digitalisasi pengawasan ini mampu mempercepat respons terhadap kasus pelanggaran serta meningkatkan akuntabilitas lembaga (Sari & Rahman, 2021; Wahyuni et al., 2022). Kajian tentang digitalisasi pengawasan publik menunjukkan pola konsisten pada tiga aspek utama: (1) peningkatan efisiensi birokrasi (2) partisipasi masyarakat melalui sistem informasi digital dan (3) penguatan basis data pengambilan keputusan (Dewi & Pratama, 2022).

Dalam konteks BPOM *Mobile*, pola ini juga muncul melalui peran aplikasi sebagai kanal pelaporan konsumen dan instrumen edukatif. Dengan demikian, penerapan BPOM *Mobile* di Kota Padang dapat dipandang sebagai bagian dari ekosistem *e-government* yang menekankan kolaborasi digital antar lembaga dan masyarakat (Rahardjo, 2021). Di Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan kualitas produk yang beredar. Berbagai tantangan dalam distribusi obat dan makanan, terutama di tengah pesatnya perdagangan internasional, membuat metode pengawasan tradisional tidak memadai lagi. Untuk mengatasi hal ini, BPOM memperkenalkan aplikasi BPOM *Mobile*. Aplikasi ini dibuat agar masyarakat dapat dengan mudah memverifikasi keaslian produk, melaporkan hal-hal mencurigakan, dan mendapatkan informasi penting dengan cepat. Kehadiran aplikasi ini menunjukkan langkah baru dalam pengawasan publik yang mulai menggabungkan teknologi.

Studi oleh Wulandari et al. (2022) menegaskan bahwa penggunaan aplikasi digital di sektor kesehatan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pengawas. Demikian pula, Hidayat (2021) menyoroti bahwa BPOM *Mobile* berfungsi sebagai kanal edukatif untuk mengubah perilaku konsumsi masyarakat. Kaitan dari kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa BPOM *Mobile* bukan hanya alat administratif, tetapi juga instrumen sosialisasi yang memperkuat literasi konsumen terhadap produk yang aman. Temuan ini sejalan dengan teori *public value* dalam inovasi digital pemerintahan (Moore, 1995), di mana teknologi tidak sekadar alat, tetapi sarana menciptakan nilai sosial.

Namun, terdapat perdebatan mengenai efektivitas implementasi digitalisasi dalam pengawasan obat dan makanan. Sutopo & Rini (2022) berpendapat bahwa digitalisasi tanpa kesiapan infrastruktur dan literasi digital masyarakat justru memperlebar kesenjangan akses layanan publik. Di sisi lain, Yuliani (2023) menilai bahwa masalah utama bukan pada teknologi, melainkan resistensi birokrasi dan kurangnya integrasi data antar instansi. Evaluasi dari dua pandangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan BPOM *Mobile* di Kota Padang tidak hanya ditentukan oleh adopsi teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, kebijakan pendukung, dan partisipasi masyarakat secara aktif. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana penerapan BPOM *Mobile* sebagai bentuk digitalisasi pengawasan obat dan makanan di Kota Padang, sekaligus mengidentifikasi tantangan serta faktor keberhasilannya dalam konteks *smart governance* daerah.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan rangkaian langkah sistematis dalam mengumpulkan, mengolah, dan menelaah data secara ilmiah untuk menghasilkan temuan yang dapat



dipertanggungjawabkan (Sari dkk, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam melalui kondisi alami, khususnya terkait proses, pengalaman, dan makna yang muncul dari fenomena yang dikaji (Creswell, 2008 dalam Semiawan). Studi ini berfokus pada proses digitalisasi aplikasi BPOM *Mobile* serta implementasinya dalam tata kelola digital BPOM Kota Padang. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat menggali secara komprehensif interaksi antara aspek sosial dan teknologi melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen resmi.

Lokasi penelitian ditetapkan di BPOM Kota Padang karena lembaga ini berwenang langsung dalam pengawasan obat dan makanan, sekaligus memudahkan akses data dan informasi, sesuai pandangan Sugiyono (2017) mengenai pentingnya ketepatan lokasi penelitian. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*, yaitu para pengelola aplikasi BPOM *Mobile* yang memiliki pengalaman langsung dalam penerapan sistem digitalisasi. Pemilihan ini bertujuan memperoleh informasi yang relevan dan mendalam (Moleong, 2017). Melalui metodologi tersebut, penelitian diharapkan mampu memberi pemahaman tajam mengenai efektivitas dan tantangan digitalisasi tata kelola melalui BPOM *Mobile* dalam konteks pelayanan publik.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Digitalisasi Pelayanan

Digitalisasi pelayanan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pemerintah mendorong instansi untuk menggunakan teknologi informasi dalam seluruh proses pelayanan. Menurut Yunaningsih dan Indah (2021), digitalisasi pelayanan tidak hanya memanfaatkan aplikasi atau sistem *online*, tetapi juga mengubah cara kerja birokrasi agar lebih cepat dan terbuka. Konsep *smart governance* mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital.

Namun, tidak semua instansi berhasil menerapkannya secara optimal. Lindawaty dan Budiman (2025) mengingatkan bahwa banyak daerah masih menghadapi kendala seperti infrastruktur yang belum merata dan kurangnya kemampuan aparatur dalam mengelola sistem digital. Oleh karena itu, digitalisasi pelayanan publik harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan integrasi sistem antar instansi. Secara umum, literatur menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan publik tergantung pada tiga hal utama: kesiapan teknologi, kemampuan SDM, dan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya.

### Pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan obat dan makanan merupakan fungsi paling penting untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dengan meningkatnya peredaran produk dan perdagangan online, BPOM dituntut beradaptasi melalui sistem pengawasan berbasis digital. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah pengembangan aplikasi BPOM *Mobile*, yang memungkinkan masyarakat memeriksa izin edar produk, melaporkan temuan berisiko, serta mendapatkan informasi keamanan pangan. Menurut Qonita dan Rokhish (2024), pengawasan melalui BPOM *Mobile* memperkuat partisipasi publik karena masyarakat dapat berperan langsung dalam melaporkan pelanggaran. Menambahkan bahwa sistem digital juga membantu mempercepat proses pengumpulan data dan memperbaiki koordinasi antar wilayah.



Meski begitu, Assegaf (2025) menilai bahwa di pengawasan obat dan makanan belum sepenuhnya efektif di daerah, karena masih ada keterbatasan dalam pemanfaatan data dan belum seragamnya pelaksanaan di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan Yuliani (2023) yang menyoroti pentingnya integritas antar sistem digital pemerintah agar informasi dari BPOM pusat dapat tersinkronisasi dengan unit daerah seperti Loka POM di Padang. Dari literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan obat dan makanan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang membangun sistem yang transparan, partisipatif, dan dapat diandalkan dalam melindungi masyarakat dari produk berisiko.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas melindungi masyarakat dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi. Di tingkat daerah, fungsi ini dijalankan oleh Loka POM (Loka Pengawas Obat dan Makanan), termasuk Loka POM di Kota Padang, yang merupakan unit pelaksana teknis dari BPOM Republik Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh produk yang beredar mulai dari obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, hingga pangan olahan aman, bermutu, dan memenuhi standar perizinan nasional. Pengawasan tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan, termasuk pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium terhadap sampel produk, pembinaan kepada pelaku usaha, serta edukasi rutin kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terkait keamanan konsumsi.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja, BPOM Padang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu: pengawasan pra dan pasca edar terhadap obat, kosmetik, pangan olahan, suplemen kesehatan, dan obat tradisional di wilayah Sumatera Barat. Pelayanan publik dalam bentuk konsultasi, edukasi, dan sertifikasi produk pangan dan obat, koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan dinas kesehatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran produk, edukasi masyarakat melalui kampanye keamanan pangan, kegiatan Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa), serta kegiatan sosialisasi di sekolah dan pasar tradisional. Selain itu, BPOM Padang juga berperan dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pendampingan sertifikasi produk. Lembaga ini turut melakukan pengawasan terpadu bersama instansi terkait untuk memastikan produk yang beredar aman, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPOM *Mobile* adalah aplikasi resmi berbasis digital yang dikembangkan oleh Badan POM Republik Indonesia sebagai bagian dari program transformasi digital pengawasan obat dan makanan. Aplikasi ini bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk: Mengecek legalitas produk obat, kosmetik, dan pangan olahan secara langsung, melaporkan dugaan pelanggaran atau efek samping produk, mendapatkan edukasi terkait keamanan dan mutu produk, meningkatkan partisipasi publik dalam sistem pengawasan. Lebih lanjut, secara spesifik, BPOM memperkuat landasan operasional aplikasi ini melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.21.03 Tahun 2021 tentang Penguatan Digitalisasi Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, yang mengatur strategi digitalisasi proses pengawasan dan peningkatan partisipasi publik. Keputusan ini menegaskan bahwa sistem pengawasan berbasis digital, termasuk BPOM



Mobile, dikembangkan untuk mendorong transparansi data publik, memperluas akses masyarakat terhadap informasi resmi, serta mempercepat respons lembaga terhadap laporan pelanggaran di lapangan.

Dengan berlandaskan keseluruhan regulasi tersebut, BPOM *Mobile* tidak hanya menjadi instrumen teknologi, tetapi juga representasi dari komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip *good governance* melalui digitalisasi layanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan. Melalui BPOM *Mobile*, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi produk yang terdaftar, melaporkan temuan produk ilegal, serta memperoleh edukasi terkait keamanan pangan dan obat secara *real time*. Inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan, sehingga tercipta ekosistem pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aplikasi ini memperkuat peran masyarakat sebagai mitra pengawasan (*public participatory surveillance*), sekaligus mendukung transformasi menuju *smart governance* di sektor kesehatan dan keamanan pangan di Indonesia, termasuk di wilayah Kota Padang sebagai salah satu daerah percontohan penerapannya.



(Gambar 1. Logo BPOM *Mobile*

Sumber: *Goggle Play Store*)

### Latar Belakang Lahirnya Aplikasi BPOM *Mobile*

Aplikasi BPOM *Mobile* merupakan bagian dari inisiatif transformasi digital nasional yang dijalankan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan berbasis teknologi. Lahirnya aplikasi ini tidak terlepas dari dinamika era Revolusi Industri 4.0, di mana penggunaan teknologi informasi menjadi elemen kunci dalam peningkatan pelayanan publik. Sebelum adanya BPOM *Mobile*, pengawasan dilakukan secara manual melalui inspeksi lapangan dan laporan tertulis, yang sering kali memerlukan waktu lama dan tidak efisien. Digitalisasi diperlukan untuk mempercepat akses informasi, memperluas jangkauan pengawasan, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam sistem pengawasan nasional.

Secara konseptual, kehadiran BPOM *Mobile* dilandasi oleh kebijakan pemerintah dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Aplikasi ini menjadi implementasi prinsip *good governance* di bidang kesehatan publik, dengan tujuan menciptakan pengawasan obat dan makanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. BPOM *Mobile* dikembangkan dengan pendekatan *user-centered design*, yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan pengecekan produk dan pelaporan



pelanggaran secara langsung melalui ponsel pintar. Hal ini menjadikan pengawasan tidak lagi bersifat *top-down*, tetapi juga partisipatif.

Dari sisi kelembagaan, digitalisasi yang dilakukan BPOM merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang menegaskan kewenangan BPOM dalam mengembangkan sistem informasi pengawasan nasional. Dengan dasar tersebut, BPOM berupaya memperkuat fungsi pengawasan di daerah melalui pengembangan sistem terintegrasi yang memungkinkan akses data secara cepat dan akurat. Salah satu bentuk konkret dari langkah ini adalah peluncuran aplikasi BPOM *Mobile* yang dirancang sebagai jembatan antara masyarakat, pelaku usaha, dan lembaga pengawas. Melalui aplikasi ini, seluruh pihak dapat berkolaborasi untuk memastikan hanya produk yang aman, bermutu, dan legal yang beredar di pasaran.

Menurut hasil studi Yuliani dan Hadi (2022) dalam Jurnal Reformasi Administrasi Publik, digitalisasi pengawasan melalui aplikasi BPOM *Mobile* memiliki peran signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Masyarakat yang sebelumnya berperan pasif kini dapat turut serta melakukan verifikasi dan pelaporan produk secara mandiri melalui fitur yang mudah diakses. Perubahan ini menandai pergeseran paradigma birokrasi dari model administratif yang tertutup menjadi model kolaboratif berbasis teknologi. Dengan demikian, pengawasan tidak lagi bersifat terpusat, melainkan lebih terbuka dan partisipatif, melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan produk di pasaran.

Lahirnya BPOM *Mobile* bukan hanya sekadar inovasi teknologi, tetapi juga bagian dari reformasi birokrasi digital di sektor pengawasan obat dan makanan. Aplikasi ini menjadi simbol komitmen BPOM RI dalam menciptakan sistem pengawasan yang inklusif, transparan, dan berbasis data. Melalui pemanfaatan teknologi digital, BPOM memperkuat keterlibatan publik serta meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran produk. Upaya ini selaras dengan visi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan mampu melindungi masyarakat dari risiko produk berbahaya atau tidak memiliki izin edar.

### **Implementasi Penerapan BPOM *Mobile* di Kota Padang**

Implementasi BPOM *Mobile* di Kota Padang dijalankan oleh Loka POM Padang, yang merupakan unit pelaksana teknis dari BPOM RI di wilayah Sumatera Barat. Sejak diluncurkan secara nasional pada tahun 2021, Loka POM Padang menjadi salah satu daerah yang aktif menerapkan aplikasi ini dalam kegiatan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat. Aplikasi BPOM *Mobile* digunakan oleh petugas untuk melakukan verifikasi data produk di lapangan serta oleh masyarakat untuk memeriksa legalitas produk melalui fitur Cek Produk. Berdasarkan laporan internal Loka POM Padang (2023), penerapan BPOM *Mobile* dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan institusi pendidikan; pelatihan bagi petugas pengawas; serta pemanfaatan data pelaporan masyarakat sebagai bahan analisis pengawasan. Proses sosialisasi dilaksanakan secara rutin di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta kegiatan edukasi publik bertema Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa).

Hasil observasi menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi ini membantu mempercepat proses identifikasi produk ilegal dan memperkuat sistem respon cepat terhadap laporan masyarakat. Sebelumnya, laporan pelanggaran harus dilakukan secara manual melalui formulir fisik. Namun



dengan BPOM *Mobile*, masyarakat dapat langsung melapor melalui *gawai* mereka dengan melampirkan foto dan lokasi kejadian. Menurut Loka POM Padang (2023), sistem digital ini meningkatkan efisiensi waktu tanggap hingga 60% dibandingkan mekanisme konvensional. Hal ini sejalan dengan Penelitian Putri dan Rafi (2023) dalam Jurnal Manajemen Pelayanan Publik juga menunjukkan bahwa penerapan BPOM *Mobile* meningkatkan efektivitas koordinasi antara pusat dan daerah dalam memantau peredaran produk berisiko. Dengan adanya integrasi data, setiap laporan yang masuk dapat langsung diverifikasi oleh petugas Loka POM dan diteruskan ke BPOM pusat untuk tindakan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam digital *governance* di sektor kesehatan publik.

Implementasi BPOM *Mobile* di Kota Padang juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi masyarakat mengenai keamanan produk yang mereka konsumsi. Masyarakat mulai lebih kritis dalam memeriksa kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa sebelum membeli produk, sehingga kesadaran terhadap pentingnya keamanan pangan semakin meningkat. Selain itu, pelaku usaha pun ter dorong untuk lebih patuh terhadap regulasi dan memperbaiki standar produksinya agar memenuhi ketentuan BPOM. Transformasi digital ini tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga membangun ekosistem kepercayaan antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen.

Dengan demikian, BPOM *Mobile* berperan penting dalam menciptakan budaya pengawasan partisipatif yang berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif di tingkat lokal. Keberhasilan implementasi ini menunjukkan bahwa inovasi digital dapat menjadi sarana efektif dalam memperkuat peran masyarakat sebagai pengawas aktif terhadap keamanan produk yang beredar. Ke depan, peningkatan literasi digital dan penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan perluasan dampak positif BPOM *Mobile* di seluruh wilayah Indonesia. Meski, implementasi di Kota Padang masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses digital di daerah pinggiran serta belum meratanya sosialisasi di kalangan pelaku usaha mikro. Namun, secara umum, penerapan BPOM *Mobile* di Padang dapat dikategorikan sebagai praktik baik (*best practice*) dalam digitalisasi pengawasan obat dan makanan di tingkat daerah, yang mencerminkan kolaborasi aktif antara pemerintah dan masyarakat.

### **Tingkat Pemanfaatan dan Pemahaman Masyarakat terhadap BPOM *Mobile***

Tingkat pemanfaatan BPOM *Mobile* di kalangan masyarakat Kota Padang masih berada pada level sedang. Berdasarkan data survei Loka POM Padang tahun 2024 terhadap 250 responden, hanya sekitar 48% masyarakat yang mengetahui keberadaan aplikasi ini, dan dari jumlah tersebut, hanya 27% yang telah menggunakan secara aktif. Temuan ini mengindikasikan bahwa sosialisasi dan edukasi publik terkait penggunaan aplikasi masih perlu diperluas agar menjangkau lebih banyak kalangan. Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan adalah literasi digital masyarakat dan persepsi terhadap pentingnya keamanan pangan. Sebagian besar pengguna yang aktif berasal dari kelompok usia muda (18–35 tahun) dan pelaku usaha makanan yang terhubung dengan *platform daring*. Sementara masyarakat umum yang berbelanja di pasar tradisional cenderung masih mengandalkan pemeriksaan visual tanpa memanfaatkan aplikasi.

Menurut Rahmawati & Pratama (2022), tingkat adopsi aplikasi layanan publik sering kali bergantung pada persepsi kemudahan penggunaan dan manfaat. BPOM *Mobile* dinilai cukup



mudah digunakan, namun kurang dimanfaatkan karena sebagian masyarakat belum memahami fitur-fitur pentingnya seperti Cek Produk dan Lapor Kejadian. Meskipun demikian, BPOM Padang terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan edukatif seperti Edukasi Pangan Aman Sekolah dan Gerakan Konsumen Cerdas. Program-program tersebut bertujuan memperkenalkan BPOM *Mobile* sebagai sarana praktis dalam memastikan keamanan produk. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat hingga 20% setelah sosialisasi berlangsung. Secara keseluruhan, tingkat pemanfaatan BPOM *Mobile* masih perlu ditingkatkan melalui strategi komunikasi publik berbasis komunitas dan media sosial.

Tingkat pemanfaatan BPOM *Mobile* yang masih berada pada kategori sedang di Kota Padang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan teknologi dan kemampuan masyarakat dalam menggunakannya secara efektif. Rendahnya literasi digital menjadi salah satu faktor kunci yang membatasi partisipasi publik dalam pengawasan berbasis aplikasi. Meskipun aplikasi ini dirancang dengan antar muka yang sederhana, sebagian masyarakat, khususnya di daerah pinggiran, masih menghadapi kendala dalam mengakses informasi digital. Kondisi ini mencerminkan pentingnya strategi pendampingan berbasis komunitas agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan BPOM *Mobile*, tetapi juga mampu menggunakaninya dengan benar. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital perlu dipadukan dengan pendekatan edukatif yang kontekstual, seperti pelatihan langsung di pasar tradisional dan pusat UMKM.

Dari sisi kebijakan, rendahnya tingkat adopsi aplikasi BPOM *Mobile* juga dapat dikaitkan dengan kurangnya integrasi antara program digitalisasi pengawasan dengan strategi komunikasi publik yang menyeluruh. Saat ini, promosi BPOM *Mobile* masih bersifat tidak merata dan lebih banyak dilakukan dalam kegiatan formal seperti sosialisasi atau pelatihan. Padahal, strategi komunikasi berbasis media sosial dan kolaborasi dengan *influencer* lokal dapat menjadi cara efektif untuk menjangkau kelompok usia muda dan pengguna aktif internet. Selain itu, melibatkan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam kampanye keamanan pangan digital dapat memperluas jangkauan informasi ke berbagai lapisan masyarakat. Upaya ini penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa pengawasan keamanan produk bukan hanya tanggung jawab lembaga, tetapi juga partisipasi aktif publik. Dengan pendekatan yang lebih adaptif, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga mitra aktif dalam sistem pengawasan digital, sehingga efektivitas BPOM *Mobile* di Kota Padang dapat terus berkembang.

### **Peran BPOM *Mobile* di UMKM**

BPOM *Mobile* memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan dan peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah, termasuk di Kota Padang. Dalam konteks ekonomi lokal, banyak pelaku UMKM yang bergerak di sektor kuliner, makanan olahan, kosmetik, dan herbal tradisional. Mereka sering menghadapi kendala administratif dan keterbatasan informasi dalam mengurus izin edar produk. Melalui digitalisasi pengawasan yang dihadirkan oleh BPOM *Mobile*, pelaku UMKM kini dapat mengakses informasi izin edar, melakukan pengecekan keaslian produk, dan mempelajari standar keamanan pangan secara mandiri. Menurut BPOM RI (2023), aplikasi ini menjadi instrumen edukatif sekaligus fasilitatif yang mempercepat proses legalisasi produk dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap standar mutu dan keamanan.



Selain fungsi pengawasan, BPOM *Mobile* juga berfungsi sebagai alat pembelajaran digital bagi pelaku UMKM. Melalui fitur “Berita BPOM” dan edukasi daring, aplikasi ini menyediakan informasi mengenai tata cara pendaftaran produk, dokumen yang diperlukan, serta panduan pengurusan izin edar melalui sistem e-registrasi BPOM. Berdasarkan penelitian Handayani & Rafi (2022), 68% pelaku UMKM yang menggunakan BPOM *Mobile* merasa lebih memahami regulasi keamanan pangan dan kosmetik dibandingkan sebelum menggunakan aplikasi. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM *Mobile* telah menjadi sarana literasi regulatif yang memperkuat posisi UMKM dalam menghadapi ketatnya standar domestik maupun global.

Implementasi BPOM *Mobile* di daerah seperti Kota Padang juga membantu memperpendek rantai birokrasi pengawasan dan legalisasi produk. Sebelumnya, pelaku UMKM harus datang langsung ke kantor Loka POM atau mengikuti bimbingan teknis tatap muka untuk mengetahui kelengkapan persyaratan izin. Kini, melalui BPOM *Mobile*, mereka dapat memantau status pendaftaran produk, memverifikasi nomor izin edar, dan mengetahui hasil evaluasi produk secara daring. Hal ini sejalan dengan temuan Loka POM Padang (2024) yang melaporkan peningkatan 35% jumlah UMKM yang berhasil memperoleh izin edar setelah pemanfaatan BPOM *Mobile* secara intensif. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga menekan biaya operasional bagi pelaku usaha kecil yang sebelumnya terbebani ongkos perjalanan dan konsultasi.

Lebih lanjut, BPOM *Mobile* juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kredibilitas dan akses pasar produk UMKM. Dengan adanya verifikasi resmi dari BPOM, produk UMKM memperoleh kepercayaan lebih tinggi di kalangan konsumen dan mitra bisnis. Sari & Nugroho (2023) mencatat bahwa legalitas BPOM menjadi salah satu indikator utama kepercayaan pasar terhadap produk pangan dan kosmetik lokal. Selain itu, pelaku UMKM yang telah terdaftar dalam sistem BPOM berpeluang untuk mengikuti program pembinaan dan sertifikasi lanjutan seperti Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Dalam konteks ekonomi daerah, hal ini berdampak langsung pada peningkatan nilai jual produk lokal dan daya saing ekspor.

### **Fitur Fitur Utama dalam Aplikasi BPOM *Mobile***

Aplikasi BPOM *Mobile* memiliki berbagai fitur utama yang dirancang untuk mengintegrasikan sistem pengawasan digital yang partisipatif dan mandiri oleh masyarakat. Fitur Cek Produk menjadi inti dari aplikasi ini, karena memungkinkan pengguna mengakses database resmi BPOM yang berisi informasi ribuan produk makanan, obat, kosmetik, dan suplemen berizin edar. Melalui fitur ini, masyarakat dapat memastikan keamanan dan legalitas produk sebelum dikonsumsi atau diperjualbelikan. Informasi yang ditampilkan mencakup nomor izin edar, nama produsen, dan status peredaran produk, sehingga meminimalkan risiko pembelian produk ilegal. Dari hasil analisis pengguna, fitur ini dianggap paling bermanfaat oleh kelompok ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil yang mengutamakan keamanan produk dalam kegiatan sehari-hari.

Selain itu, fitur Pemindaian *Barcode/QR Code* menjadi bentuk inovasi digital yang signifikan dalam mendukung efisiensi pengawasan. Teknologi ini memungkinkan pengguna memindai kemasan produk untuk mendapatkan data izin edar secara otomatis tanpa harus mengetik nomor registrasi. Namun, beberapa kendala teknis masih ditemukan, seperti ketidakmampuan kamera untuk fokus atau sistem yang gagal membaca *barcode* tertentu. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pemindaian agar dapat bekerja lebih optimal di berbagai jenis



perangkat. Dengan pengembangan teknologi yang lebih baik, fitur ini berpotensi menjadi alat utama dalam mempercepat proses verifikasi produk secara *real time* dan akurat.

Fitur Informasi Produk Bermasalah dan Pengaduan Masyarakat juga berperan penting dalam memperkuat fungsi pengawasan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Fitur ini menyediakan notifikasi langsung saat BPOM mengumumkan produk yang ditarik dari peredaran atau terindikasi berbahaya, sehingga konsumen dapat segera memeriksa produk yang telah dibeli. Selain itu, masyarakat dapat melaporkan produk mencurigakan melalui fitur pengaduan dengan melampirkan foto dan lokasi kejadian. Berdasarkan laporan BPOM, pelaporan digital melalui aplikasi memiliki waktu tanggap lebih cepat dibandingkan metode manual. Dengan demikian, fitur ini mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas pertama terhadap keamanan produk di lingkungan mereka.

Fitur terakhir, Edukasi Publik, melengkapi sistem pengawasan digital dengan menyediakan konten pembelajaran yang informatif dan mudah diakses. Melalui fitur ini, masyarakat memperoleh pengetahuan tentang cara mengenali produk ilegal, memahami bahaya bahan kimia berbahaya, serta mempraktikkan perilaku konsumsi aman. Upaya ini tidak hanya meningkatkan literasi keamanan pangan dan obat, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya tanggung jawab bersama dalam pengawasan. Jika dikembangkan secara berkelanjutan, fitur edukasi ini berpotensi menjadi instrumen pembelajaran publik yang mendukung terwujudnya ekosistem *smart governance* di sektor kesehatan dan keamanan pangan. Dengan demikian, BPOM *Mobile* tidak hanya menjadi alat pengawasan digital, tetapi juga sarana edukatif yang memperkuat peran aktif masyarakat dalam sistem pengawasan nasional.

### **Langkah – Langkah dalam Penggunaan Aplikasi BPOM *Mobile***

Langkah pertama dalam penggunaan BPOM *Mobile* adalah melakukan instalasi aplikasi melalui toko aplikasi resmi, yaitu *Google Play Store* untuk pengguna Android atau *App Store* untuk pengguna iOS. Aplikasi ini dikembangkan secara resmi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) dan dapat diunduh secara gratis oleh masyarakat. Setelah proses instalasi selesai, pengguna disarankan membaca panduan singkat yang tersedia di halaman awal aplikasi untuk memahami fitur-fitur utamanya. Tahap awal ini penting agar pengguna memahami fungsi BPOM *Mobile* sebagai sarana verifikasi legalitas produk obat, makanan, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Dengan pemahaman tersebut, pengguna dapat memanfaatkan aplikasi secara optimal dalam mendukung pengawasan produk yang aman dan legal.

Setelah aplikasi terpasang, pengguna diwajibkan melakukan registrasi akun pribadi untuk mengaktifkan seluruh fitur yang tersedia. Proses pendaftaran dilakukan dengan mengisi data diri seperti nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon aktif yang akan diverifikasi menggunakan kode OTP (*One Time Password*). Tahapan ini bertujuan mencatat identitas pengguna dalam sistem keamanan aplikasi sekaligus memastikan keabsahan laporan masyarakat. Dengan adanya sistem verifikasi, BPOM dapat melakukan pelacakan terhadap laporan atau aduan yang dikirimkan pengguna dengan lebih akurat. Setelah akun terdaftar, pengguna memperoleh akses penuh ke seluruh fitur utama aplikasi BPOM *Mobile*.

Setelah *login*, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi yang menampilkan berbagai fitur seperti Cek Produk, Notifikasi, Berita BPOM, dan Lapor Kejadian. Antar muka



aplikasi dirancang dengan tampilan sederhana, ikon intuitif, serta panduan langkah demi langkah agar mudah digunakan oleh semua kalangan. Desain ini mencerminkan pendekatan *user friendly* yang menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan adopsi aplikasi layanan publik digital. BPOM juga menyediakan menu bantuan yang berfungsi memberikan petunjuk teknis penggunaan setiap fitur. Dengan kemudahan navigasi ini, aplikasi menjadi lebih inklusif dan dapat diakses oleh masyarakat dengan berbagai tingkat literasi digital.

Fitur utama yang paling sering digunakan adalah Cek Produk, yang memungkinkan masyarakat memverifikasi legalitas produk dengan cepat. Pengguna dapat mengetikkan nama produk atau nomor izin edar (*MD, ML, TR, NA*) secara manual, atau menggunakan fitur pemindaian *barcode/QR code* pada kemasan. Sistem secara otomatis menampilkan status legalitas produk, nama produsen, kategori, dan masa berlaku izin edar. Fitur ini membantu masyarakat menghindari produk palsu, ilegal, atau berbahaya yang beredar di pasaran. Dengan kemudahan ini, BPOM Mobile menjadi alat dalam perlindungan konsumen terhadap risiko kesehatan akibat produk tidak berizin.

Setelah pengecekan dilakukan, hasil verifikasi akan muncul dalam dua kategori, yaitu “Terdaftar di BPOM” atau “Tidak Terdaftar.” Jika produk terdaftar, pengguna dapat melihat rincian lengkap seperti nomor izin edar, komposisi, dan jenis produk. Sebaliknya, jika produk tidak ditemukan, pengguna disarankan berhati-hati dan menggunakan fitur Lapor Kejadian untuk melaporkan temuannya. Mekanisme ini mencerminkan bentuk transparansi digital pemerintah, di mana masyarakat dapat mengakses informasi publik secara langsung tanpa proses birokrasi panjang. Dengan demikian, sistem ini memperkuat kepercayaan publik terhadap BPOM sebagai lembaga pengawas yang terbuka dan responsif.

Fitur Lapor Kejadian memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam pengawasan obat dan makanan melalui mekanisme pelaporan digital. Jika menemukan produk mencurigakan, rusak, atau menimbulkan efek samping, pengguna dapat mengisi formulir laporan yang mencakup nama produk, lokasi, deskripsi masalah, dan foto pendukung. Laporan tersebut secara otomatis dikirim ke *database* pusat BPOM dan diteruskan ke Loka POM Padang untuk wilayah Sumatera Barat guna ditindaklanjuti. Melalui sistem ini, laporan masyarakat dapat ditangani lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pelaporan manual. Dengan keterlibatan publik ini, konsep pengawasan berbasis masyarakat semakin kuat dan terintegrasi dengan sistem nasional.

Selain fungsi pengawasan, BPOM *Mobile* juga menyediakan fitur “Berita BPOM” sebagai kanal informasi resmi yang menyajikan pengumuman penarikan produk, pembaruan regulasi, dan kampanye edukatif. Fitur ini memperkuat komunikasi antara lembaga pengawas dan masyarakat dalam penyampaian informasi yang aktual dan terpercaya. Berdasarkan studi Sari & Nugroho (2023), penyediaan informasi relevan melalui *platform* digital terbukti meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Oleh karena itu, fitur ini menjadi sarana penting dalam membangun citra BPOM sebagai lembaga yang transparan, adaptif, dan komunikatif. Dengan fitur berita ini, masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan terkini mengenai keamanan obat dan makanan di Indonesia.

Selanjutnya, pengguna dapat menyesuaikan pengaturan aplikasi melalui menu Profil dan Notifikasi. Pengguna dapat mengatur preferensi notifikasi seperti peringatan produk ilegal, pembaruan izin edar, atau informasi penarikan produk tertentu. Notifikasi ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini atau *early warning system* yang meningkatkan kewaspadaan masyarakat



terhadap risiko produk berbahaya. Dengan adanya pengaturan ini, pengguna dapat menerima informasi yang relevan sesuai kebutuhannya. Penggunaan sistem notifikasi adaptif ini memperkuat fungsi pengawasan digital yang responsif terhadap dinamika peredaran produk di pasar.

Setiap aktivitas pengguna dalam aplikasi, baik pengecekan maupun pelaporan, secara otomatis terekam dalam sistem pusat BPOM. Data tersebut digunakan untuk memetakan tren peredaran produk di wilayah tertentu dan menjadi dasar evaluasi kebijakan pengawasan. Sejak implementasi aktif BPOM *Mobile*, laporan masyarakat meningkat hingga 40%, menandakan efektivitas sistem digital dalam mendorong partisipasi publik. Selain itu, sistem validasi otomatis membantu petugas menghindari laporan ganda dan mempercepat tindak lanjut pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi pengawasan melalui BPOM *Mobile* mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas lembaga pemerintah.

Langkah terakhir adalah melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas aplikasi, baik oleh BPOM maupun masyarakat pengguna. BPOM secara rutin memperbarui aplikasi untuk memperbaiki *bug*, meningkatkan keamanan data, serta menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan terus meningkatkan literasi digital agar dapat memanfaatkan seluruh fitur aplikasi dengan optimal. Dengan kolaborasi ini, BPOM *Mobile* dapat terus berkembang sebagai instrumen utama dalam sistem pengawasan digital nasional. Keberhasilan aplikasi ini bukan hanya hasil inovasi teknologi, tetapi juga bukti nyata sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan obat dan makanan di Indonesia.

### **Dampak Penerapan BPOM *Mobile* terhadap Efektivitas dan Transparansi Pengawasan**

BPOM *Mobile* memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Kota Padang. Proses pelaporan masyarakat kini lebih cepat dan akurat karena dilakukan secara digital. Berdasarkan laporan BPOM RI (2023), penerapan aplikasi ini meningkatkan jumlah laporan pelanggaran produk sebesar 40% secara nasional, dengan respon lebih cepat hingga 50% dibandingkan sistem manual. Dari aspek transparansi, BPOM *Mobile* memfasilitasi masyarakat untuk mengakses informasi produk secara terbuka, seperti nomor izin edar, masa berlaku, dan nama produsen. Hal ini mendukung prinsip keterbukaan publik (*open government data*). Sari & Nugroho (2023) menegaskan bahwa transparansi digital meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah karena memungkinkan masyarakat memverifikasi data secara mandiri.

Penerapan BPOM *Mobile* di Kota Padang tidak hanya mempercepat proses pelaporan dan penanganan kasus, tetapi juga mendorong perubahan paradigma dalam sistem pengawasan publik. Sebelumnya, mekanisme pengawasan cenderung bersifat *top-down* dengan dominasi peran pemerintah, namun kini beralih menjadi sistem yang lebih partisipatif. Masyarakat memiliki peran aktif sebagai pengawas pertama melalui mekanisme pelaporan langsung di aplikasi. Pola ini menciptakan hubungan dua arah antara pemerintah dan masyarakat, di mana partisipasi publik menjadi bagian integral dari tata kelola pengawasan yang transparan. Dengan adanya kanal komunikasi digital ini, BPOM mampu membangun jejaring pengawasan yang adaptif terhadap dinamika pasar dan perilaku konsumen di era digital.

Dari sisi efisiensi administratif, BPOM *Mobile* memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan data dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Data laporan yang terhimpun secara



digital memungkinkan BPOM melakukan analisis pelanggaran, memetakan wilayah rawan peredaran produk ilegal, serta mengidentifikasi pola distribusi yang berisiko. Integrasi data antara pusat dan daerah mempercepat proses verifikasi dan tindak lanjut, sehingga meminimalkan duplikasi pekerjaan yang sering terjadi pada sistem manual. Selain itu, sistem digital ini mendukung pengembangan kebijakan pengawasan yang lebih adaptif dan responsif terhadap situasi lapangan. Dengan demikian, BPOM *Mobile* menjadi pondasi penting dalam membangun sistem pengawasan yang cerdas (*smart monitoring system*) di sektor obat dan makanan.

Dari perspektif sosial, kehadiran BPOM *Mobile* turut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan produk yang mereka konsumsi. Edukasi publik yang disediakan melalui aplikasi mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dan kritis dalam memilih produk, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan pelaku UMKM. Masyarakat mulai memahami bahwa keamanan pangan dan obat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Selain itu, kecepatan dan kemudahan akses informasi meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah sebagai lembaga pelindung konsumen.

Secara keseluruhan, BPOM *Mobile* berperan sebagai katalisator menuju budaya pengawasan partisipatif yang berkelanjutan dan memperkuat fondasi digital *governance* di tingkat daerah. Selain itu, sistem ini meningkatkan kolaborasi lintas instansi, seperti Dinas Kesehatan dan Satpol PP, dalam penindakan produk ilegal. BPOM *Mobile* juga memperkuat sistem *traceability*, di mana setiap laporan masyarakat dapat ditelusuri status penanganannya. Ini mencerminkan prinsip akuntabilitas publik yang lebih baik dalam birokrasi modern. Dengan demikian, BPOM *Mobile* tidak hanya berfungsi sebagai alat teknologi, tetapi juga sebagai mekanisme reformasi birokrasi menuju tata kelola pengawasan yang efisien, transparan, dan berbasis partisipasi masyarakat.

### Hambatan dalam Penerapan Aplikasi BPOM *Mobile*

Kendati membawa dampak positif, implementasi BPOM *Mobile* di Padang masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan sosial. Hambatan utama berupa keterbatasan jaringan internet dan ketidakstabilan *server* aplikasi, terutama saat trafik pengguna meningkat. Hal ini memengaruhi efektivitas pelaporan masyarakat secara *real-time*. Selain itu, literasi digital masyarakat yang masih rendah menjadi penghalang utama. Sebagian masyarakat, terutama di wilayah pinggiran, belum terbiasa menggunakan aplikasi berbasis *daring*. Yuniarti & Dewi (2023) menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan budaya organisasi yang mendukung inovasi.

Kendala lain muncul dari pelaku usaha mikro yang belum memahami manfaat BPOM *Mobile* dalam legalisasi produk. Beberapa menganggap penggunaan aplikasi hanya menambah beban administratif. Rendahnya tingkat kepercayaan diri masyarakat dalam menggunakan aplikasi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Dari sisi kelembagaan, koordinasi antar instansi masih belum optimal. Sistem BPOM *Mobile* belum sepenuhnya terintegrasi dengan data pemerintah daerah, sehingga proses tindak lanjut laporan kadang terhambat. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan strategi peningkatan kapasitas digital melalui pelatihan petugas, penyediaan infrastruktur jaringan, serta kolaborasi lintas lembaga. Dengan langkah tersebut, BPOM *Mobile* dapat menjadi model pengawasan digital nasional yang efektif dan inklusif di masa mendatang.



Hambatan teknis dan sosial yang dihadapi dalam implementasi BPOM *Mobile* di Kota Padang menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga kesiapan ekosistem pendukungnya. Keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah menyebabkan proses pelaporan dan verifikasi produk sering tertunda. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara BPOM, pemerintah daerah, dan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas akses infrastruktur digital. Selain itu, peningkatan stabilitas *server* dan pembaruan sistem perlu dilakukan secara berkala agar aplikasi dapat berfungsi optimal saat trafik pengguna meningkat. Dengan dukungan infrastruktur yang kuat, efektivitas BPOM *Mobile* sebagai sarana pengawasan digital dapat terus ditingkatkan.

Dari sisi sosial, rendahnya literasi digital masyarakat menuntut pendekatan edukatif yang lebih adaptif dan berkelanjutan. BPOM bersama Loka POM Padang dapat menggandeng sekolah, komunitas pasar, dan kelompok UMKM untuk mengadakan pelatihan penggunaan aplikasi berbasis praktik langsung. Pendekatan partisipatif ini akan membantu masyarakat memahami manfaat BPOM *Mobile* tidak hanya sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan konsumen. Selain itu, peran tokoh masyarakat atau *influencer* lokal dalam kampanye keamanan pangan digital dapat mempercepat adopsi aplikasi di kalangan masyarakat luas. Dengan demikian, peningkatan kapasitas digital dapat berjalan bersamaan dengan penguatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengawasan berbasis teknologi.

Sementara itu, dari aspek kelembagaan, sinergi antar instansi menjadi kunci keberlanjutan program pengawasan digital ini. Dari sisi kelembagaan, koordinasi antar instansi masih belum optimal. Sistem BPOM *Mobile* belum sepenuhnya terintegrasi dengan data pemerintah daerah, sehingga proses tindak lanjut laporan kadang terhambat. Integrasi data antara BPOM *Mobile* dan sistem informasi milik pemerintah daerah akan mempercepat proses verifikasi dan penindakan terhadap laporan masyarakat. Diperlukan pula mekanisme koordinasi reguler antara BPOM, Dinas Kesehatan, dan instansi penegak hukum agar tindak lanjut kasus dapat dilakukan secara terukur dan transparan.

Selain itu, dukungan kebijakan nasional yang mendorong integrasi sistem antar lembaga akan memperkuat fungsi BPOM *Mobile* sebagai *platform* pengawasan terpadu. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan strategi peningkatan kapasitas digital melalui pelatihan petugas, penyediaan infrastruktur jaringan, serta kolaborasi lintas lembaga. Dengan langkah tersebut, BPOM *Mobile* dapat menjadi model pengawasan digital nasional yang efektif dan inklusif di masa mendatang. Dengan koordinasi yang solid, hambatan administratif dapat diminimalkan, dan BPOM *Mobile* berpotensi menjadi model praktik terbaik (*best practice*) dalam pengawasan digital di Indonesia.

## KESIMPULAN

Penerapan BPOM *Mobile* di Kota Padang menunjukkan kemajuan signifikan dalam transformasi digital pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Aplikasi ini telah berhasil meningkatkan efisiensi layanan, transparansi informasi, serta partisipasi masyarakat dalam sistem pengawasan publik. Melalui fitur seperti Cek Produk dan Lapor Kejadian, masyarakat kini dapat memverifikasi keaslian produk dan melaporkan pelanggaran secara langsung. Hal ini tidak hanya mempercepat proses deteksi produk ilegal, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah



dan masyarakat. Dengan demikian, BPOM *Mobile* berperan penting dalam menciptakan ekosistem pengawasan yang responsif dan terpercaya.

Dalam konteks ekonomi daerah, BPOM *Mobile* turut memberikan dampak positif terhadap penguatan kapasitas UMKM. Melalui digitalisasi proses perizinan dan edukasi regulatif, pelaku usaha kecil kini lebih mudah memahami prosedur legalisasi produk serta standar keamanan pangan. Akses informasi yang cepat dan transparan membantu UMKM meningkatkan kualitas produk sekaligus kepercayaan konsumen. Studi menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi ini mendorong peningkatan jumlah UMKM yang memiliki izin edar resmi dari BPOM. Oleh karena itu, BPOM *Mobile* tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi berbasis teknologi..

Meski memiliki banyak manfaat, penerapan BPOM *Mobile* masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah. Diperlukan sinergi antara BPOM, pemerintah daerah, dan lembaga pendukung UMKM untuk meningkatkan edukasi digital serta memperluas akses aplikasi hingga ke masyarakat lapisan bawah. Dengan dukungan tersebut, BPOM *Mobile* dapat berfungsi lebih optimal sebagai model pengawasan partisipatif yang inklusif. Ke depan, keberlanjutan inovasi ini menjadi kunci dalam memperkuat kepercayaan publik dan memastikan keamanan produk yang beredar di masyarakat. Secara keseluruhan, BPOM *Mobile* menjadi simbol keberhasilan digitalisasi pelayanan publik di bidang kesehatan dan keamanan pangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, H. (2025). Akuntabilitas Pengawasan Obat dan Makanan di Era Digital. *Jurnal Kebijakan Publik Digital*, 4(1), 23–38.
- BPOM RI. (2023). *Laporan Tahunan Transformasi Digital BPOM*. Jakarta: Badan POM RI.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, L., & Pratama, R. (2022). Digital Governance and Public Data Management. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 144–158.
- Lindawaty, M., & Budiman, T. (2025). Tantangan Implementasi Digitalisasi Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 12(1), 1–16.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putri, S., & Rafi, M. (2023). *Efektivitas Kampanye Digital dalam Peningkatan Adopsi Layanan Publik Elektronik*. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 11(2), 88–104.
- Qonita, A., & Rokhish, D. (2024). Kebijakan Digitalisasi Pelayanan Publik pada Aplikasi BPOM Mobile. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 89–103.
- Rahardjo, D. (2021). Kolaborasi Digital dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 8(4), 233–249.
- Rahmawati, I., & Pratama, A. (2022). Faktor Adopsi Aplikasi Layanan Publik Digital di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik Digital*, 4(1), 44–57.
- Sari, M., & Nugroho, D. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Digital pada Lembaga Pemerintah. *Jurnal Transparansi Publik*, 7(1), 91–105.



- Sari, M., & Rahman, T. (2021). Digitalisasi Pengawasan Obat dan Makanan di Era 4.0. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 13(2), 122–130.
- Sari, R., dkk. (2022). *Metode Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Semiawan, C. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, A., & Rini, K. (2022). Tantangan Implementasi SPBE di Daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(1), 65–79.
- Wulandari, E., Putra, S., & Ningsih, R. (2022). Aplikasi Digital dan Kepercayaan Publik terhadap Institusi Pengawas. *Jurnal Komunikasi Publik*, 7(2), 144–158.
- Yuliani, N. (2023). Interoperabilitas Sistem Digital Pemerintahan Daerah. *Jurnal Kebijakan Publik Digital*, 2(1), 45–60.
- Yuliani, R., & Hadi, F. (2022). Digitalisasi Birokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik di Era 4.0. *Jurnal Reformasi Administrasi Publik*, 8(3), 155–170.
- Yunaningsih, A., & Indah, S. (2021). Digitalisasi Pelayanan Publik di Indonesia: Antara Efisiensi dan Resistensi. *Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 115–129.
- Yuniarti, S., & Dewi, N. (2023). Tantangan Implementasi SPBE di Lembaga Pemerintah. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Digital*, 9(1), 56–70.